SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MERESPON PERMASALAHAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh:

David Raymon Watunwotuk

NIM : 15520171

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan penguji Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 29 Juli
Pukul : 10.00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. Penguji/Pembimbing	.....
Utami Sulistiana, S.P., M.P Penguji Samping 1	.....
Analius Giawa, S.IP., M.Si Penguji Samping 2	.....

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: David Raymon Watunwotuk
NIM	: 15520171
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tentang Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Merespon Ekonomian Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19, ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis yang diterbitkan oleh yang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Jika saya melakukan pelagiat maka saya bersedia menerima sanksi atau pencopotan Gelar Akademik yan sudah saya peroleh di STPMD "APMD Yoyakarta.

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Yang menyatakan

David Raymon Watunwotuk

HALAMAN MOTTO

“ Tetap Semangat Walaupun Tanpa Ada Penyemangat “

*_D R W_*

“Semua Akan Indah Pada Waktunya, dan Tetap Banyak Belajar dari Sekian Banyaknya Peristiwa”

*_Allan Inanosa_*

“ Hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu “

*_Amsal 1 ayat 7-8_*

“ Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segalah rencanamu ”

*_Amsal 16 ayat 3 (TB)_*

“ Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia “

*_Kolose 3 ayat 23_*

“ If You Bring Enough Positivity To An Area, The Nigativity Has No Choice But To Leave ”

*_Ron Clark_*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada kata-kata yang terindah, selain mengucapkan puji dan syukur kepada TUHAN YESUS yang Maha Tinggi, karena kasih dan berkat-Nya penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penyusun berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Terimakasih kepada Kedua Orangtua saya (Bapak Frans Danci Watun wotuk dan Ibu Renni Baulu) atas cinta dan kasih sayang yang begitu luarbiasa yang selalu mendukung dan mendoakan saya sampai saat ini. Tanpa doa dan dukungan mereka saya tidak bisa sampai ke tahap ini.
2. Terimakasih juga buat kakak dan adik-adik saya (Riyanto Mela, Marlon, Nona Bertha) dan Keponakan tersayang (Mey Aya Watunwotuk)
3. Keluarga Besar Forum Komunikasi Mahasiswa Papua (FOKMAPA) STPMD “APMD”
4. Keluarga Besar HIPMACERI dan ASRAMA MANSINAM III Yogyakarta
5. Kawan-kawan Almamater STPMD “APMD” Angkatan 2015
6. Sahabat-sahabat dan orang terdekat saya, Ayub Pakage, Grein Wutoy, Pa Iek, Wardo, Patho, Zhul, Shara, Ayu, David Gandaimu, Fansi, Herry, Boby, Kax Inho Mofu, Adam, Ethy, angel, Ade Theys, Ichat Mnsen, Djeane Mayor Leftungun, Allan A Inanosa, John R Wororik dan yang terkhusus buat Kax Willem Sedik dan Amelia H Wambrauw, terimakasih atas bantuannya dan motivasinya selama ini.
7. Kawan-kawan Asrama Nicki Muid, Yusman Mandacan, Hamba Aris, Yermias, Marshel, Richard Ullo, Day, Abang Rojas, Ronny Saiba, Mesack Ullo dan teman-teman lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka.
8. Teman-teman KKN kelompok 9 (Fandry, Krisna, Mutiara, Ivin) dan warga Kampung Semaki Gede, Kelurahan Semaki

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN YESUS KRISTUS yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **" Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Merespon Permasalahan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19"** ***(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY).***

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dalam menguasai ilmu pengetahuan, maka sudah tentu penyusunan skripsi ini masih banya kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Selama proses penulisannya sampai dengan penyelesaian skripsi ini, banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui. Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu sudah sepantasnya apabila dalam

kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan Bapak/Ibu karyawan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan layanan terbaik dalam proses penyusunan tugas akhir.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan dari awal hingga penyelesaian penulisan Skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan serta pegawai administrasi di lingkungan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
5. Desa Srimartani, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penyusunan Skripsi
6. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini, yang mana penulis tidak bisa menyebutkannya satu-persatu.

Dengan diiringi harapan dan doa semoga semua pihak tersebut diatas yang telah berjasa senantiasa mendapat perlindungan dan pahala yang setimpal dengan kebaikan dari TUHAN YANG MAHA KUASA serta semoga

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Penulis,

David Raymon Watunwotuk

INTISARI

Virus corona atau yang disebut covid-19 merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang tidak hanya menjadi virus mematikan terhadap masyarakat saja melainkan berdampak juga bagi kebutuhan hidup masyarakat dalam hal ini ekonomi masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan perhatian dari berbagai kalangan seperti pemerintah. Sebagai penanggungjawab atas kehidupan masyarakatnya pemerintah kelurahan harus membuat berbagai kebijakan yang dapat mengatasi perekonomian masyarakat agar kebutuhan masyarakat tetap teratasi. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana kebijakan pemerintah kelurahan dalam mengatasi perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah kelurahan dalam mengatasi perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha untuk menggambarkan yang ada sekarang berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan judul dan tema yang diambil pada penelitian ini tentang *kebijakan pemerintah kelurahan dalam mengatasi perekonomian masyarakat di masa pandemi covid-19,* dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati (observasi), mewawancarai secara mendalam (interview) dan mendokumentasikan data yang terdapat didalam penelitian. Subyek informan adalah Kepala Kalurahan, Sekertaris Kalurahan, Kasi Ulu-ulu, Bamuskal, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat, yang keseluruhannya berjumlah 8 orang.

Hasil penelitian ini di kemukakan bahwa: (1) dampak covid-19 terhadap perekonomian masyarakat sangat berdampak buruk sekali terhadap masyarakat yang mana dengan adanya pandemi covid-19 ini mengakibatkan pendapatan masyarakat mengalami penurunan secara drastis. (2) kebijakan pemerintah kelurahan dalam mengatasi perekonomian masyarakat kelurahan di masa pandemi covid-19: a. Bentuk bantuan sosial, dalam situasi pandemi covid-19 ini pemerintah desa mencoba untuk melakukan berbagai hal agar dapat mencegah keterpurukan ekonomi yang dialami masyarakat dengan mengambil beberapa kebijakan dalam mengatasi perekonomian masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial dan bantuan yang diberikan ialah berupa bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari APBN dan APBD. b. Sasaran dan Tujuan, sebagai penanggungjawab terhadap ketahanan ekonomi masyarakat maka semua bantuan sosial yang diberikan hanya difokuskan kepada masyarakat yang bertujuan agar dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Dan kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan semua sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai instruksi dari pusat maupun daerah.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Ekonomi, Pemerintah Desa, dan Kebijakan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang mengalami kelumpuhan yang besar sepanjang sejarah peradaban di muka bumi ini, tidak hanya melumpuhkan asset ekonomi saja melainkan juga kepada manusia dan bahkan manusia ialah sasaran utama dari serangan berbahaya ini. Sebutlah kita sedang melakukan perang atau yang dikenal dengan sebutan virus ini tersebar di berbagai penjuru dunia dan masalah yang saat ini sedang dunia hadapi yakni virus Corona yang merugikan dunia termasuk Indonesia.Singkatnya pemahaman tentang virus coronaini yakni corona adalah nama virus, yang kemudian biasa disebut dengan virus Corona atau *Coronavirus* sedangkan penyakit yang disebabkan oleh virus Corona ini biasa di sebut Covid- 19.

Penularan Covid-19 ini meningkat dalam setiap harinya, bahkan yang terinfeksi Covid-19 ini bisa tertular 2–3 orang dan sampai bahkan ratusan orang, betapa mengerikan virus ini sehingga yang terjadi adalah jumlah kematian yang semakin meningkat, ekonomi masyarakat semakin menurun karena kurangnya pendapatan. Sejak diberlakukannya peraturan PSBB sehingga mengharuskan masyarakat bekerja dan belajar dari rumah membuat sebagian masyakarat merasa tertekan. Bagaimana tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sangatlah susah untuk para pekerja harian,

bantuan yang berdatangan tidaklah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara aman**.**

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pihak pemerintah Pusat dan daerah. Masing-masing untuk mengantisipasi dan mencegah perluasan penyebaran virus corona tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran virus Corona yaitu menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)yakni tidak mengunjungi tempat yang ramai, menjaga jarak antar sesama, dan melakukan aktivitas di rumah,beribadah dilakukan dirumah, sekolah maupun perguruan tinggi ditutup sementara dengan melakukan pembelajaran melalui kelas *online*.

Peraturan PSBBini tentunya mempunyai dampak bagi masyarakat terutama dalam kehidupan sosialbermasyarakat yang manabiasanya melakukan kontak sosial dengan masyarakat lain seperti bersalaman, berkumpul, mengikuti kegiatan, bekerja, berwisata dan masih banyak hal lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan sedikit berbeda dari biasanya, tapi masyarakat harus siap melakukan hal tersebut demi memutuskan penyebaran virus Corona.Dampak dari virus Corona ini sangat merugikan bagi pemerintah dan masyarakat, salah satunya ialah perlambatan ekonomi. Pembatasan sosial berskala besar ini menjadi pemicu perlambatan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif dibidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Dibidang fiskal pemerintah melakukan sebuah kebijakan yang memfokuskan padakegiatan

dan realokasi anggaran. Dalam hal inilah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpress) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Memfokuskan Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar Rp.62,3 T. Dana tersebut diambil dari perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, hal ini untuk penanganan atau pengendalian Covid-19, perlindungan sosial (*social safety net)* dan intensif dunia usaha. APBD juga diharapkan dapat difokuskan dan realokasi 3 hal tersebut. Dalam menunjang penanganan Covid-19 disediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, tim medis yang menangani pasien Covid-19. *Social safety net* diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah bahwa sebagian Dana Desa juga akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa bantuan sosial di desa. Yang mana bantuan ini difokuskan kepada masyarakat menengah kebawah, seperti petani, buruh harian lepas, dan juga para nelayan yang ada di pedesaan. Bantuan tersebut diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per-bulan dengan jangka waktu selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp21 Triliun. Persebaran Covid-19 telah

menyebabkan korban jiwa tidak sedikit dan mengganggu perekonomian seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin hadirnya negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman, dengan berbagai program sebagai jaring pengaman sosial, antara lain yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementrian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh Kementrian Desa.

Kemenkeu juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Disamping itu pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komperensif di bidang fiskal guna untuk menstabilkan keuangan negara dan perekonomian masyarakat. Melihat musibah yang sedang dialami di Indonesia tentunya membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah, UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya.

Hal ini berdampak buruk, karena apabila pekerja-pekerja tidak bisa menghasilkan uang, maka mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya

pilihan lain. Pasalnya mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan, sehingga mau tidak mau pulang ke kampung halaman adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup.

Dari dampak yang sudah dipaparkan di atas, bagaimana kondisi masyarakat ditengah PSBBdan juga bagaimana kondisi perekonomian masyarakat desa di tengah PSBB?

Ketika suatu negara atau daerah memutuskan untuk melakukan PSBB sementara waktu, tentunya dampak perekonomian bagi kelompok menengah kebawah akan sangat besar dan keadaan masyarakat desa sangat menghawatirkan ekonomi mereka yang setiap harinya ditopang oleh pendapatan pada hari itu juga. Pemasukan menjadi sangat rentan karena ketika mereka tidak bekerja maka pendapatan mereka juga tidak ada.

Lain halnya bagi mereka yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai lembaga formal, meskipun mereka tidak bekerja selama dua pekan karena kerja dari rumah, gaji mereka di awal bulan masih tetap utuh.

Bisa dibayangkan bahwa jika pegawai informal, pedagang kecil-kecilan, buruh pabrik yang terkena PHK, dan orang yang kerjanya serabutan, tentu mereka sangat rentan dengan kemiskinan. Satu hari saja mereka tidak bekerja, maka tidak ada yang dapat dimakan untuk hari itu dan esoknya.

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi pada wilayah atau daerah tertentu tetapi juga dampak tersebut dapat dialami di Kalurahan

Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Yogyakarta.

Dalam observasi yang dilakukan di Kalurahan Srimartani dapat diketahui bahwa Kalurahan Srimartani termasuk salah satu kalurahan yang mempunyai penduduk yang sangat banyak sebagaimana di ketahui bahwa Jumlah penduduk di Kalurahan Srimartani kurang lebih sebanyak 10.231 jiwa, dengan jumlah penduduk yang sebanyak ini dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan disisi lain masyarakatnya juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu berdagang dan juga buruh harian lepas. Maka yang terjadi terhadap perekonomian masyarakat Kalurahan Srimartani dimasa Covid-19 ini mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis, karena yang terjadi adalah hasil pertanian masyarakat sering mengalami pembusukan karena tidak laku dijual di pasar dan masyarakat yang berdagang dan buruh harian lepas tidak dapat bekerja semenjak diberlakukannya peraturan PSBB.Selama masa pandemi Covid-19 ini pemerintah desa tidak melakukan pendataan, pendataan akan dilakukan apabila ada permintaan dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsikepada masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 ini agar menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan juga tidak ada kebijakan khususdari pemerintah desa melainkan pemerintah desa hanya menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat. Dan pendataan yang dilakukan itu pun pemerintah desa akan menyerahkan pendataan tersebut ke setiap wilayah padukuhan untuk mendata,

dengan bertujuan agar masyarakat desa tidak berkerumun di kantor desa dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Maka dari itu sangat dibutuhkan tindakkan dari pemerintah Kalurahan Srimartani yang dapat membantu pencegahan Covi-19 dan permasalahan perekonomian masyarakat di masa seperti sekarang ini.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kalurahan Srimartani sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 adalah Kalurahan menghimbau kepada masyarakat agar menghindari kegiatan rutinitas mereka seperti rapat-rapat warga, rapat RT, arisan, pengajian warga, senam masal bahkan majelis rutin ruwahan selama bulan Syakban di Kalurahan Srimartani dan semua kegiatan dipusatkan di rumah masing-masing demi mencegah penyebaran Covid-19 di kalurahan Srimartani.

Selain kebijakan mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Pemerintah Kalurahan juga berupaya mengambil kebijakan lain dalam rangka merespon perekonomian masyarakat ditengah pandemi seperti menyediakan sembako dan memonitoring serta mendistribusikan atau merealisasikan bantuan lannya kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut untuk menjawab kondisi masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: ”Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Merespon Permasalahan ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 di Kalurahan Srimartani?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini menfokuskan tentang Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Merespon Permasalahan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19, di Kalurahan Srimartani

2. Manfaat Penelitian

a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian.

b. Dengan adanya penelitian ini kiranya peneliti dapat mengetahui secara mendalam tentang Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Merespon Permasalahan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19, di Kalurahan Srimartani

D. Kerangka Konsep

1. Dampak Pandemi Covid-19

Covid-19 terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat, banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah.

Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi pemerintahan.

Penyebaran Virus Corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interkasi masyarakat. Dampak ini dapat menyebabkan pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, bahkan akses antar pasar pun diliburkan.

Segala aktivitas perekonomian masyarakat macet dan mengalami penuruan pendapatan secara drastis selama masa pandemi Covid-19 akibat dari kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan tentang stay home and work from home dan membatasi kontak fisik *(physcal distancing).* Disatu sisi, social distancing ini memberikan dampak positif terkait penyebaran Covid-19 di Kalurahan Srimartani. Namun di sisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi korban, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan Kementrian Kesehatan Indonesia, perkembanagan kasus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Commuitte mengeluarkan pernyataan *"urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause"* (Hanoatubun, 2020).

Penyebaran Virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat kurang-lebih 200 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona yang telah

meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Keadaan dunia saat sekarang apabila dilihat dari pemaknaan totem, telah mengalami pengalihan sosok totem tersebut.

2. Kebijakan Pemerintah Desa

a. Kebijakan

Menurut Card Friedrich (dalam Vargilius T Agun 2020: 6), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Hogwoood dan Gunn, menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil outcome,

sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik (Vargilius T Agun 2020: 7)

Dari istilah di atas dapat dipahami bahwa kebijakan adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan memiliki *outcomes*di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional.

Abdul Wahab Solichin, mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang pendapat para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, (Abdul Wahab, 2005) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari keputusan, c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan, d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan, e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, f) Setiap kebijakan memiliki tujuan dan sasaran tertentu baik eksplesit maupun implisit, g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi yang bersifat intra organisasi, i) Kebijakan meski tidak

ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Menurut Budi Winarno (2007: 15) istilah kebijakan *policy trem*mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi jepang" dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnyajika kita mengatakan kebijakan tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Abdul Wahab Solichin dan Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (Goals) program, keputusan undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.Pendapat Richard Rose sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2007: 17) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai rangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Pendapat ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan diapahami sebagai arah atau pola kegiatan da bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat dalam unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada, guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

b. Pemerintah Desa

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, bahwa pemerintahan desa ialah penyelenggaraan urusan pemerntahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah

hakekatnya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya.

Dengan demikian pemerintahan desa dapat diartikan sebagai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa terpilih dan dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku jabatan, kepala desa mengucapkan janji. Menurut Bayu Suryaningrat (dalam Reno A Kuaswara 2019: 15)), yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah “suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yaitu pemerintah desa”. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa

merupakan seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai yakni mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam bidang politik, pembangunan maupun ekonomi secara umum.

Pemerintah desa merupakan salah satu aspek penting pengelolahan sosial desa. Ditangan lembaga-lambaga pemerintahan desa tergenggam dua peran penting aktor pengemban kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di satu sisi, serta agen perpanjangan tangan Negara disisi lain. Sekalipun semangat desentralisasi membawa angin segar bagi harapan akan otonomi desa, namun regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah desamasih menempatkan pada posisi yang amat tergantung pada pemerintahan di level Kabupaten dan Provinsi.

Menurut Taliziduhu Ndraha (dalam Reno A Kuaswara 2019:16) mendefinisikan pengertian aparatur pemerintah desa adalah "bagian integral dari aparatur pemerintahan Indonesia. Maka dari itu aparatur pemerintah desa sekaligus adalah bagian integral masyarakat desa karena mereka adalah pilihan masyarakat". Dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah desa adalah perangkat atau alat kelengkapan Negara yang menjalankan roda pemerintahan khususnya pemerintah desa sehari-hari.

Karena mereka adalah pilihan rakyat maka mereka adalah bagian dari kesatuan masyarakat desa. Aparatur pemerintahan desa

bukanlah semata-mata pelaksana pemerintahan daerah dari atas, melainkan sebagai pemimpin dan penyalur apresiasi masyarakat kepada pihak atasnya. Segala sesuatu yang berkenan dengan kepentingan masyarakat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Sebagai motivator (pendorong) dan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pada umumnya dan berperan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa pada khususnya, maka perlu adanya usaha pelaksanaan tugas dan kewajiban kerah kemajuan efektif. Oleh karena itu, dalam melakukan perannya aparatur pemerintah desa diharapkan mampu menguasai informasi tentang kehidupan masyarakat desa di segala bidang, melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembagunan maupun ekonomi desa dan berusaha meningkatkan jiwa kegotong-royongan masyarakat desa, dan secara khusus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan.

3. Ekonomi Dan Sistem Perekonomian

a. Ekonomi

Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Ekonomi atau *economic*dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikosnamos atau Oikonomia yang berarti perusahaan atau manajemen rumah tangga khususnya penyediaan administrasi pendapatan Raharja dan Mandala, 2008 yang dikutip oleh Dr. Subhan Purwadinata (2020:2). Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peri-kehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja yang dimaksud dan perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Secara umum bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang prilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi.

Kata ekonomi adalah penyerapan dari bahasa Inggris Economics yang asalnya dari bahasa Yunani oikonomia. Isitilaah ini dalam konteks yunani kuno disebut manajemen keluarga atau rumah

tangga. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapan diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi yang memepelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.

J.L Mey Jr mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang memepelajari usaha manusia ke arah kemakmuran yang berbeda konsepnya dengan Adam Smith yang mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu.

Dari paparan tentang teori ekonomi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia atau masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan uang atau tidak. Disisi lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya masyarakat masih bisa memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada agar dapat bertahan hidup, apa lagi disaat situasi seperti sekarang ini.

b. Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan

mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seseorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah.

Safri Hendra (2018: 63) Ada berbagai sistem ekonomi yang digunakan Negara-negara di Dunia untuk mencari solusi akan maslah ekonomi di wilayahnya masing-masing tergantung dari ideologi dan karakter budaya, adapun sistem tersebut diantaranya:

1. Sistem Ekonomi Tradisional

   Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.

2. Sistem Ekonomi Terpusat

   Pada sistem ekonomi ini, pemerintah bertindak sangat aktif yang mana segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat atau pelaksanaan dilakukan oleh daerah-daerah di bawah satu komando dari pusat.

3. Sistem Ekonomi Pasar

   Pada sistem ekonomi pasar, kehidupan ekonomi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme proses.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan pada negara-negara berkembang. Dalam sistem ini sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui.

Sejak Indonesia merdeka dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas telah digariskan kebijakan nasional untuk melakukan transformasi ekonomi yaitu mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi yang demokratis. Tepatnya dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah memberikan petunjuk bagaimana sistem ekonomi Indonesia. Dalam pasal 33 tersebut tidak hanya menggambarkan atau memberikan petunjuk bagaimana sistem ekonomi di Indonesia melainkan juga menggambarkan bagaimana cita-cita oleh pendiri negara Indonesia yang menginginkan adanya satu sistem ekonomi tertentu di Indonesia yang berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.

Indonesia secara imperatif harus memiliki komitmen tegas dalam menyusun perekonomian kearah perekonomian yang berdasar pada paham usaha bersama dan kekeluargaan. Dalam pengertiannya secara umum asas kekeluargaan dapat diartikan adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya adalah kelurganya sendiri, sehingga tujuan kelompok tersebut akan dengan mudah tercapai.

Untuk mengerti apa pokok persoalan ekonomi, kita berpangkal dari dua kenyataan ini:

a. Untuk dapat hidup layak, kita membutuhkan serta menginginkan bermacam-macam hal : makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, pendidikan, dan lain-lain. Kebutuhan (needs) manusia banyak dan beraneka ragam sifatnya. Apabila keinginan (wants) boleh dibilang tak ada batasnya.
b. Tetapi sumber-sumber, sarana atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu, termasuk waktu yang tersedia, itu terbatas atau langka, artinya kurang dari yang kita butuhkan atau kita inginkan, baik dalam hal jumlah, bentuk, macam, waktu dan tempat.

Dari dua kenyataan pokok tersebut timbullah pokok persoalan ekonomi yaitu : bagaimana dengan sumber-sumber yang terbatas orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam itu? Pokok persoalan tersebut dihadapi oleh perorangan, keluarga, perusahaan, koperasi, bangsa dan negara sebagai keseluruhan, bahkan oleh dunia internasional.Untuk menanggapi persoalan itulah, maka timbul kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi, yang diatur oleh suatu cara berfikir dan cara bertindak yang disebut ekonomis atau menurut prinsip ekonomi.

Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap keluarga adalah bagaimana dengan penghasilan yang masuk dapat mencukupi

segala kebutuhan keluarga (baik saat sekarang maupun yang akan datang)? Atau bagaimana menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran? Bagi setiap keluarga hal ini menjadi masalah. Entah karena penghasilan memang kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak. Entah karena kebutuhannya begitu besar (atau ada kebutuhan mendadak) padahal penghasilannya tetap.

4. Masyarakat Desa

Masyarakat desa atau dengan kata lain masyarakat pedesaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahpasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto(dalam Rosidin Utang 2019: 7), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Hanif Nurcholis(2011: 14), desa adalah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan demikian kesimpulannya, desa adalah suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan didalamnya mereka saling bergotong royong dan memiliki suatu sistem kehidupan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usui, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan *(self govening community)*dan pemerintahan lokal *(local self government)*sehingga desa berwajah ganda, yaitu pemerintahan dan masyarakat, atau berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, tetapi mencakup tentang pemerintahan sekaligus masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.

Setiap desa memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya.

b. Penduduk, yaitu hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri.

Adapun fungsi desa adalah sebagai berikut.

a. Dalam hubungan dengan kota, desa yang merupakan *Hinterland*atau daerah dukung yang berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan makanan pokok.

b. Dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah *(raw material)* dan tenaga kerja *(man power)*yang tidak kecil artinya.

c. Dari segi kegiatan kerja *(occupation)*desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya.

Ciri-ciri masyarakat desa adalah sebagai berikut.

1. Di dalam masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih mendalam dan jika dibandingkan dengan masyarakat desa lainnya di luar batas-batas wilayahnya.

2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau paguyuban).

3. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan atau *part time* yang biasa mengisi waktu luang.

4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat, dan sebagainya.

Masyarakat desa identik dengan istilah gotong royong, yang merupakan kerjasama untuk mencapai kepentingan mereka. Kerja sama tersebut terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya diistilahkan dari bawah).
b. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri barasal dari luar (biasanya berasal dari atas).

Berdasarkan uraian tersebut, Rosidin Utang (2019: 11), ciri-ciri masyarakat desa di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Homogenitas Sosial

Masyarakat desa terdiri atas satu atau beberapa kekerabatan saja sehingga pola hidup tingkah laku ataupun kebudayaannya sama atau homogen. Hubungan primer pada masyarakat desa hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah.

2. Kontrol Sosial yang Ketat

Setiap anggota masyarakat saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota lain, bahkan ikut menyelesaikannya.

3. Gotong Royong

Nilai-nilai gotong royong pada masyarakat desa tumbuh dengan subur dan membudaya.

4. **Ikatan Sosial**

Setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat.

5. **Magis Religius**

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangat mendalam.

6. **Pola Kehidupan**

Masyarakat desa bermata pencaharian dibidang agraris, baik pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Oleh sebab itu sebagai mahkluk sosial sangat terasa apabila kita dapat ikut langsung kedesa dan berada di lingkungan pedesaan, dan juga bagaimana rasanya menjadi orang desa akan merasakan perasaan menjadi masyarakat disebuah desa. Sungguh kesederhanaan yang bisa dijadikan teladan. Dan masyarakat desa masih menerapkan adat-istiadatnya didalam masyarakatnya, juga tidak sedikit desa yang masih menggunakan warisan dari kebiasaan nenek moyang daerah mereka masing-masing. Masyarakat desa pun kental dengan budaya yang turun temurun yang sudah di terapkan dalam kehidupan mereka.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi Ruang Lingkup dalam penelitian initerkait kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi perekonomian masyarakat desa di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Dampak pandemiCovid-19 terhadap ekonomimasyarakat,di Kalurahan Srimartani
2. Kebijakan pemerintah desa dalam meresponpermasalahan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19, di Kalurahan Srimartani

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penilitian

Jenis penilitian yang digunakan ialah penilitian deskriptif kualitatif. Sugiono(2015:8) mendefinisikan penilitian kualitatif sebagai metode penilitian yang dilandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meniliti pada kondisi objek yang almiah, dimana peniliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif. Dan hasil penilitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penilitiandeskriptifmerupakan penilitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya.Penilitian kualitatif sebagai prosedur penilitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Unit Analisis

Mencari subyek penilitian atau informan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penilitian

secara fakta. Dalam juga dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri ataukaraktheristik dari populasi suatu objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Maka dari itu, informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 'koordinasi pemberdayaan masyarakat'.

Sehingga dalam penilitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Smpling.* Purposive sampling adalah teknik dengan cara mengambil sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Agar memudahkan dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti.

Dari unit penelitian ini peneliti menentukan beberapa informan yang menjadi sasaran dan sumber penelitian sebagai berikut :

Tabel I.1.

Daftar Narasumber

No	NAMA	Jenis Kelamin	USIA (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Bpk. H Mulyana	L	53	D3	Lurah
2	Bpk. Eko Herri Purwanto	L	36	S1	Sekertaris Kelurahan
3	Bpk. Jumadi	L	42	SLTA	Kasi Ulu-Ulu
4	Bpk. Ilham T Murdo	L	54	SLTA	Bamuskal
5	Bpk. Suhardiana	L	53	SLTA	Tokoh Masyarakat
6	Bpk. Syarif Nur Hidayat	L	27	SLTA	Tokoh Masyarakat
7	Bpk. Ridho	L	47	SMP	Masyarakat
8	Ibu Yati	P	41	SMP	Masyarakat

Sumber: Data olahan dan wawancara penelitian 2021

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun alat pengumpul data yang relevan. Oleh sebab itu sebelum peneliti melakukan penelitian dilapangan maka beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Menurut Burhan Bungin (2007:110), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian didefenisikan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya, seperti telingga, penciuman, mulut dan kulit. Pengamatan akan dilakukan di Kalurahan Srimartani.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Maleong dalam Kosay Iryanto (2020:36). Tanya jawab yang akan dilakukan meliputi dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat desa.

c. Dokumentasi

Sugiono (2015: 234), Dokumentasi adalah sebuah catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dalam dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dan juga dokumen yang berupa karya misalnya karya seni yang berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penilitian kualitaif, Sugiono (2015: 234).

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:244), teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Peneliti kemudian akan mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam buku yang sama, terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang

tinggi. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah berbentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi ataugambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

BAB II

PROFIL KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Desa

Kalurahan Srimartani merupakan penggabungan dari tiga Kalurahan yaitu Kalurahan Gendongan, Kalurahan Daraman, dan Kalurahan Petir. Kebijakan ini berlaku ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggabungan Daerah-Daerah Kalurahan pada tahun 1946, yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa desa kecil menjadi satu desa yang cukup besar agar otonomi pemerintahan desa dapat dijalankan dengan biaya dari kas desa itu sendiri. Proses penggabungan Kalurahan tersebut dikenal dengan istilah blengketan. Proses penggabungan tersebut baru selesai pada tahun 1948 dan ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/1948 tanggal 19 April 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

Adapun nama-nama Lurah Desa yang pernah memimpin Kalurahan Srimartani pada table di bawah ini:

Tabel II-1

Nama-Nama Lurah/Kepala Desa sebelum

dan sesudah berdidrinya Kalurahan Srimartani

No	Periode	Nama Lurah/Kepala Desa
1.	1946 -	Raden Sutiman
2.	1990-1998	Suradal
3.	2002-2012	Ruspamuji
4.	2012-2018	H. Mulyana
5.	2018-2024	H. Mulyana

Sumber:*https://srimartani.bantulkab.go.id*,(15/02/2021)

Berdasrakan tabel di atas menunjukan bahwa presentase preode dari setiap Lurah Desa yang berada di Desa Strima menunjukan presentasi yang cukup signifikan. Dalam artian bahwa perkembangan masing-masing periode dari Kepala Desa, terus mengalami peningkatan, walaupun di tahun periode 1990-1998 samapai 2002 mengalami masa jedah waktu 2 tahun.

B. Letak Geografis dan administratif

Keadaan umum wilayah Kalurahan Srimartani berada di wilayah Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan keadaan sebagai berikut:

a. Keadaan Fisik / Geografis Desa

- Batas Wilayah
  - Sebelah Timur Desa : Kalurahan Ngoro-oro, Patuk
  - Sebelah Barat Desa : Kalurahan Jogotirto Berbah
  - Sebelah Utara Desa : Kalurahan Sumberharjo
  - Sebelah Selatan Desa : Kalurahan Srimulyo

Berdasrkan batas wilayah diatas dapat di simpulakan bahwa Kalurahan Srimartani berada tepat di tengah empat desa-desa tersebut. Kalurahan Srimartani sendiri menjadi pusat sentral pembangunan dan akses bagi beberap desa yang ada di wilayah tersebut.

- Luas Wilayah : 857.7375 Ha
  - Tanah Persawahan : 401.4995 Ha
  - Tanah Pemukiman : 250.5990 Ha
  - Tanah Hutan /Tegalan : 131.7670 Ha
  - Tanah Perkebunan : 73.8720 Ha

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa potensi Kalurahan Srimartani yang meliputi tanah persawaan, tanah pemukimana, tanah hutan/tegalan dan tanah perkebunan total tanah yang digunakan secara keseluruhan sebesar 857.7377 HA. Potensi Kalurahan Srimartani ini dibagi menjadi empat bagian yaitu hampir sebagain besar tanah di gunakan untuk lokasi persawahan, sedangakan tanah pemukiaman hanya berkisar 250.5990 HA sisanya itu di gunakan untuk perkebuanan dan pelestarian alam.

- Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi desa merupakan daerah dataran rendah. Dan termasuk kawasan budidaya pertanian,peternakan, ini merupakan penyangga produksi pertanian serta berkembang menjadi kawasan wisata perdesaan.

b. Wilayah Administrasi Pemerintah Desa:

Kalurahan Srimartani terdiri dari 17 Pedukuhan yang meliputi 114 RT. Merupakan kawasan pusat pemerintahan, kawasan ini sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi / bisnis.

Tabel II-2

Jumlah Dukuh, Rukun Tetangga (RT), dan luas Pedukuhan

Di Kalurahan Srimartani

No	Dukuh	Jumlah RT	Luas (Ha)	%
1.	Mandungan	10	56,4650	6,94
2.	Piyungan	10	31,9735	3,93
3.	Pos Piyungan	6	84,2190	10,36
4.	Wanujoyo Kidul	5	27,2530	3,35
5.	Wanujoyo Lor	6	31,4100	3,86
6.	Munggur	6	35,9070	4,42
7.	Mutihan	5	31,5735	3,88
8.	Daraman	7	32,9240	4,05
9.	Kwasen	5	60,3900	7,43
10.	Mojosari	5	57,4750	7,07
11.	Kembangsari	10	48,0100	5,90
12.	Petir	9	29,4575	3,62
13.	Sanansari	7	37,0900	4,56
14.	Bulusari	6	58,7720	7,23
15.	Rejosari	7	72,0850	8,86
16.	Kemloko	4	29,1552	3,59
17.	Umbulsari	4	79,3490 9	4,76
Jumlah		**112**	**813,1960**	**100,00**

Sumber : Laporan *Database Profile Kalurahan Srimartani* 2018.

Berdasarkan tabel data diatas menujukan bahwa pedukuhan yang berada di Kalurahan Srimartani memiliki 17 padukuhan dengan jumlah 112 RT dari 17 pedukuhan yang ada di Kalurahan Srimartani. Berdasarkan tabel menujukan masing-masing Padukuhan rata-rata memiliki 10 RT dari 3

Pedukuhan, sedangakan yang sisanya ada pedukuhan yang memiliki jumlah 9 RT samapi dengan 4 RT.

Penyebaran wilayah di Kalurahan Srimartani seperti data diatas maka terlihat bahwa luas kalurahan Srimartani sangat luas dengan memiliki puluhan ribu hektar tanah dan kemudian dibagi lagi kepada setiap RT/RW dan Pandukuhan yang ada di Kalurahan Srimartani. Masing-masing padukuhan memiliki rata-rata luas wilayah yang berbeda, padekuhan paling luas 84,2190 Ha dengan presentase luas wilayah sebesar 10,36%. Dari presentase luas wilayah di atas menunjukan bahwa Padukuhan yang rata-rata jumlah RT nya terbilang sedikit mala memiliki luas wilayah yang besar. Artinya bahwa luas wilayah padekuhan tidak menuntukan banyaknya RT, begitupun sebaliknya Jumlah RT tidak di tentukan dari luas suatu wilayah Padukuhan.

C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk 15.087. jiwa yang terdiiri dari:

- Laki-laki : 7.418 jiwa
- Perempuan : 8.257 jiwa
- Jumlah KK : 3.853 KK

Berdaskan data di atas dapat di lihat bahwa total jumlah KK yang berada di Kalurahan Srimartani adalah sebesar 3.853 KK dari total jumlah penduduk 15.087 juwa. Presentasi perempuan dan laki masing-masing berkisar diatas 7000 sampai dengan 8000. Sehingga dapat di simpulkan bahwa dominasi perempuan lebih berkembang dari laki-laki.

b. **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: (dalam KK / Jiwa)**

- Miskin : 1.370 KK

Berdasarkan tingakat kesejahtraan masyarakat Kalurahan Srimartani dengan presentasi keluarga miskin sebesar 1.370 KK dari total 3.853 KK artinya disini dapat di simpulkan bahwa kehidupan Kelurga dengan ekonomi menengah ke atas masih berada di urutan atas yaitu sebesar 2.483 atau 35,55%.

Berdasarkan persentase diatas menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kalurahan Srimartani secara keseluruhan rata-rata cukup maksimal dalam menghadapi masa pandemi. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Kalurahan Srimartani baik itu secara individu mapun kelompok.

c. **Tingkat Pendidikan**

Tabel II-3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Srimartani

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	(%)
1	Tidak tamat sekolah	0	0
2	SD	1.105	28,82
3	SMP	1.248	32,55
4	SLTA	1.248	32,55
5	D3	117	3,03
6	Sarjana	116	3,02
	Jumlah	**3.834**	**100,00**

(Sumber : Monografi Kalurahan Srimartani 2018/2024)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tingakat pendidikan penduduk di Kalurahan Srimartani tahun 2019 yang terbanyak ada pada tamatan SMP dan SLTA sebanyak 1.248. tingkat pendidikan akan terus meningkat

apabila ditunjang oleh sarana prasarana pendidikan yang memadai. Karna dengan adanya fasilitas tersebut maka sangat mungkin dapat mewujudkan generasi-genarasi cerdas dan invatif. Kalurahan Srimartani mempunyai sarana pendidikan. Dengan tersedianya prasarana pendidikan di Kalurahan Srimartani tentu akan membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalurahan Srimartani.

d. **Mata Pencaharian**

Tabel II-4

Penduduk Berdasar Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	(%)
1.	Pertanian	4.467	78,00
2.	Pegawai Negeri	539	9,42
3.	Pegawe suasta	81	1,41
4.	Pedagang	92	1,60
5.	Buruh kerja	246	4,30
6.	Pertukangan	87	1,52
7.	Pensiunan	104	1,81
8.	ABRI/POLRI	72	1,25
9.	Jasa	31	0,54
	Jumlah	**5.719**	**100,00**

(Sumber : Monografi Kalurahan Srimartani 2018/2024)

Berdasakan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Srimartani kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai petani, hal ini disebabkan karna lahan pertanian di Kalurahan Srimartani yang terbilang cukup luas di tambah Kalurahan Srimartani yang berada tepat di daerah dataran rendah dan curuh hujan yang cukup tinggi. Selain tingakt pekerjaan yang rata-rata swasta. Kalurahan Srimartini juga memiliki

jumlah PNS yang terbilang cukup banyak sehingga dapat menunjang kehidupan mereka dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

e. **Pola Penggunaan Tanah**

Penggunaan tanah di Kalurahan Srimartani sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian dan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitasfasilitas lainnya

f. **Kepemilikan Ternak**

Jumlah kepemilikkan hewan ternak oleh penduduk Kalurahan Srimartani terdiri dari:

Tabel. II-5

Kepemilikan Ternak

No	Ternak	Jumlah (Ekor)	(%)
1	Sapi	1.225	6,10
2	Kerbau	7	0,03
3	Kambing	1.567	7,81
4	Ayam Ras	6.000	30,00
5	Ayam Kampung	11.255	56,60
	Jumlah	**20.054**	**100,00**

(Sumber : Monografi Kalurahan Srimartani 2018/2024)

Berdasarkan analisis tabel di atas bahwa, dapat di simpulkan bahwa, selain pola kehidupan masyakarat yang ketergantungan terhadapan pertanian, masyarakatpun ikut untuk beternak. Sehingga dapat di simpulkan bahwa salah satu sumber pendapatan masyarakat Kalurahan Srimartani selain bekerja dan bertani, masyarakatpun ikut untuk beternak. Hampir sebagian dari seluruh masyarakat Kalurahan Srimartani mempunyai usaha peternakan masing-masing dan jenis ternak pun

berbeda-beda. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk dan ciri desa mandiri.

g. **Potensi Sumberdaya Alam :**

- Padi : 12 ton/th/ha
- Kedelai : 1.2 ton/th/ha
- Jagung : 5.4 ton/th/ha
- Ketela : 9.6 ton/th/ha
- Kacang tanah : 2.3 ton/th/ha

Berdasarkan rincian potensi suber daya alam yang tertera di atas dapat di simpulakan bahwa potensi sumber daya alam yang di Kalurahan Srimartani yang terdiri, bertani padi, kedelai, jagung, ketela dan kacang tanah. Namun yang paling menunonjol dari potensi pertanian yang ada di Kalurahan Srimartani adalah komoditi padi dan ketel hal ini dapat dilihat dari pendapatan masyarakat Kalurahan Srimartani dalam satu tahun sebesar 12 Ton sedangakan ketela sebesar 9.6 Ton. Dengan demikian untuk meningkatkan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Srimartani. Penting untuk pemerinta desa menagmbil bagian ppenting untuk menunjang keberlangsungan suberdaya alam yang ada.

h. **Lainnya :**

- Home Industri :

Home industri merupakan usaha yang berpusat dirumah atau secara sederhananya pekerjaan yang di produksi dari rumah.

Oleh sebab itu home industri yang dimiliki masyarakat kalurahan Srimartani dapat dirincikan sebagai berikut:

- Tempe : 10 unit
- Tahu : 5 unit
- Criping : 5 unit
- Peyek : 5 unit
- Ikan tawar : 6 unit

Kalurahan Srimartani selain memiliki potensi sumber daya alam yang di dapat di kelo melalui pertanian dan peternakan, Kalurahan Srimartani juga mempunyai home industri hal ini dapat di lihat dari industri rumahan yang di miliki Kalurahan Srimartani. Industri rumahan di Kalurahan Srimartani memiliki peluang dan tantangan untuk meningkatkan pendapatan rumahan dan pendapatan kas desa. Peluannya adalah membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan menciptankan lapangan pekerjaan, yang kedua tantangannya adalah bagemana usaha Industri rumahan itu mampu di pertahankan dan pemerinta desa haruh itu serta dalam mengawasi dan ikut meningkatkan kemajuan dari Home Industri.

D. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Kalurahan Srimartani secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Balai Desa : 1 buah

- Gedung Serba Guna : 1 buah
- PAUD : 10 buah
- TK : 13 buah
- SD
    - Negeri : 5 buah
    - Swasta : 1 buah
- SMP : 4 buah / Swasta
- SLTA : 3 buah / Swasta
- Puskesmas pembantu : 1 buah
- KORAMIL : 1 buah
- KUA : 1 buah
- BPP : 1 buah
- Insiminator sapi : 1 buah
- Kantor pengairan : 1 buah
- PDAM : 1 buah
- Balai Benih Pembantu : 1 buah
- SPBU : 1 buah
- Jalan Desa : belum terdata
- Jalan Kabupaten : 5 Km
- Jembatan : 7 buah
- Gorong – gorong Saluran Irigasi : 28 buah
- Dam / Bendungan : 1 buah
- Dam parit : 1 buah

- Dam pengendali lereng : 2 buah
- Lapangan olah raga : 1 buah
- Masjid : 32 buah
- Mushola : 61 buah
- Madrasyah diniah : 9 buah
- TPA : 22 buah
- Kantor lembaga agama : 1 buah
- Pasar : 1 buah

Berdasakan data di atas dapat dilihat bahwa Kalurahan Srimartani sendiri terbilang cukup maju dari sisi infrastruktur, kalau dilihat dari kelengkapan infrastruktur banguan, jalan, tempat-tempat umum dan jembatan. Berdasakarkan data dapat di simpulkan bahwa kemajuan pembanguan inftarastrukur di Kalurahan Srimartani, dapat terbilang berkembang karena lokasinya yang cukup strategis dimana bisa kita lihat jalan posisi jalan penghungung lintas kabupaten gunung kidul dan klaten. Sehingga kemajuan infrastruktur itu tidak terlepas dari sarana-prasana yang di tunjang pemerinta desa dan pemerinta daerah.

E. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Visi Misi Pemerintah Desa

VISI “Terbentuknya Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa akuntable dan transparan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sehat ,sejahtera lahir batin yang agamis dan dinamis “

mengandung maksud bahwa segala kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan lahir dan batin sebagai perwujudan kepedulian dan kejujuran terhadap diri pribadi maupun komunitas. Mengingat bangsa kita telah mengalami kondisi sakit selama dalam penjajahan. Menciptakan kebersihan dalam seluruh aspek kehidupan sebagai manifestasi dari rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bersih itu merupakan bagian dari keimanan. Sudah barang tentu bersih dalam arti luas. Damai mengandung cita-cita bahwa kondisi riil masyarakat Srimartani cukup majemuk dari berbagai sudut pandang baik: Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama, sehingga damai dan rukun merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan di Kalurahan Srimartani Akan sangat sia-sia kemakmuran dan kesejahteraan yang hampir terwujud ini apabila nanti terkontaminasi oleh suasana ketidak-rukunan dan ketidakdamaian.

MISI Pemerintah Desa seperti dalam RPJMDes 2018-2024 Misi Kalurahan Srimartani dirumuskan sebagai berikut:

- Melakasanakan kordinasi secara rutin untuk mengoptimalkan kinerja pamong desa ,lembaga desa dan elemen masyarakat untuk lebih memacu segala daya usaha dan upaya membangun desa dengan mengedepankan potensi SDM dan SDA yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya NYAWIJI KANGGO SRIMARTANI
- Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk pembangunan desa secara menyeluruh dengan berdasarkan undang-undangan dan

ketentuan-ketentuan hokum Negara , adat/masyarakat yang berlaku untuk melaksanakan pembangunan yang merata di berbagai bidang antara lain:

a. Kesehatan

b. Pendidikan

b. Pemerintahan

c. Peningkatanekonomikemasyarakatan

d. Pertbaikaninsfratruktutur

e. Senidanbudaya

f. Pemuda,olah raga danpariwisata

b. Personil Pemerintah Kalurahan

Tabel II-6

Personil Pemerintah Desa Periode 2018-2024

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	H. Mulyana	Lurah	D3
2	Eko Herri Purwanto	Sekretaris	Sarjana/S1
3	Gunanjar	Ka. Sie Pemerintahan	SLTA
4	Suratman	Ka. Sie Kesejahteraan	SLTA
5	Isbandiyo	Kaur Tata usaha dan umum	SLTA

(Sumber : Monografi Kalurahan Srimartani 2018/2024)

Dalam data monografi perangkat inti kalurahan Sriamrtani terlihat cukup efektif secara kualitas perangkat. Dalam hal ini terlihat bagaimana proses pelayanan mereka terhadap masyarakat serta dapat mengakomodir aspirasi masyarakat setempat sebelum dan sesudah di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Dr. Subhan Purwadinata, SE.,ME dkk. 2020. *Pengantar Ilmu Ekonomi kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta

H. Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.* CV. Pustaka Setia: Bandung

Maleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Winarno, B. 2007. *Kebijakan publik : Teori dan proses*. Jakarta: Buju Kita

Safri Hendra. 2018. Pengantar Ilmu Ekonomi. Lembaga Kampus IAIN Palopo: Kota Palopo

Reno A, Kuaswara. 2019. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Desa.* Skripsi STPMD "APMD": Yogyakarta

Virgilius T, Agun. 2020. *Kebijakan Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi STPMD "APMD": Yogyakarta

Jurnal

Muhammad, Y. A. (2019). Perekonomian nasional dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia(19/10/2020)

Indonesian Journal of Nursing and Healt Sciences. Vol.1. Nomor 1, Oktober 2020.

Petaruran Perundang-undangan :

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Lain

https://www.simulasikredit.com/dampak-pandemi-virus-corona terhadap-dunia/ 18/10/2020

https://www.simulasikredit.com/dampak-pandemi-virus-corona-terhadap-dunia/ 18/10/2020

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html 18/10/2020

https://covid19.go.id/p/berita/upaya-upaya-pemerintah-penuhi-kebutuhan-pokok-masyarakat-di-tengah-pandemi-covid-19 30/11/2020

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia 18/10/2020

http://www.infodiknas.com/wp-content/uploads/2014/12/pembangunan-perekonomian-nasional-melalui-pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf*(18/10/2020)*

https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri(18/10/2020)

https://www.kompasiana.com/ilhamriza/54f73210a33311db748b4708/eksistensi-kebijakan-pemerintah-desa(30/11/2020)